

PEMERINTAH KABUPATEN BONE



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur. Untuk mewujudkan pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap.MPRRI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Serta berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 202 dimaksudkan sebagai wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Bone. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 merupakan perwujudan kewajiban BPKAD untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode Tahun 2018-2023. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggung jawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

LKjIP ini merupakan bentuk formal pertanggung jawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi yang bermanfaat untuk :

- a. Mewujudkan rumusan kebijakan perencanaan pengelolaan keuangan daerah yang terpadu dan realistis.
- b. Mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan baik yang bersifat kewilayahan maupun sektoral.
- c. Menyerahkan kegiatan pengelolaan keuangan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- d. Mewujudkan keseimbangan keuangan antar wilayah dan sektor sesuai dengan unit kerjanya.
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun

- 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
 17. Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah

Dalam Pemerintah Kabupaten Bone peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, sangat vital sekali yaitu sebagai *stake holders* dalam menggali Pendapatan Daerah dan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bone.

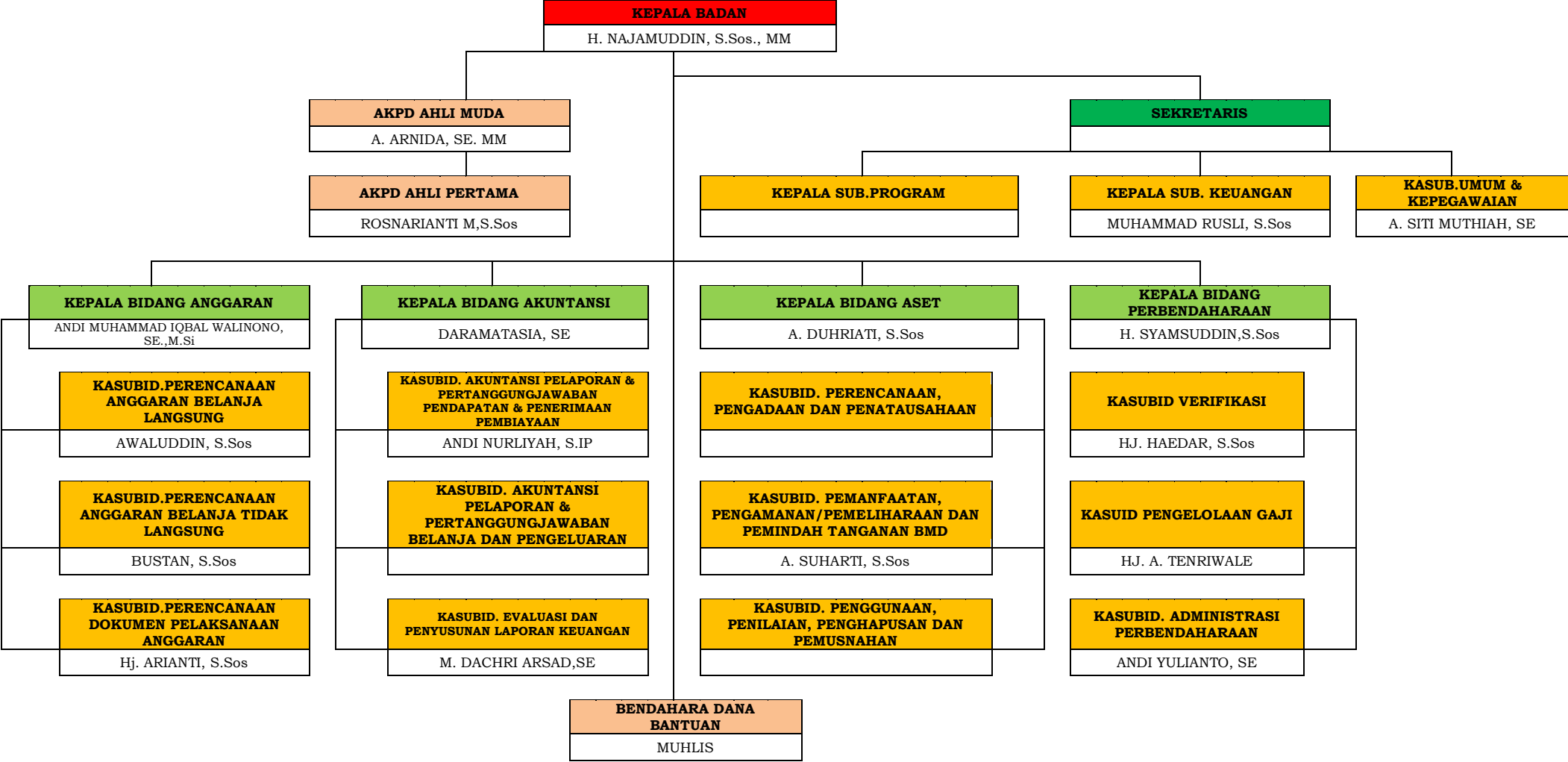
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD

Berdasarkan Peraturan Bupati No 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Gambar 1.1



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki susunan organisasi sebagai berikut terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
- c. Kepala bidang Anggaran
- d. Kepala bidang Akuntansi
- e. Kepala Bidang Perbendaharaan
- f. Kepala Bidang Aset

Tugas dan Fungsi

a. Kepala Badan

Tugas : Memimpin organisasi dalam melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Fungsi :

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD
- Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
- Melaksanakan fungsi BUD
- Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
- Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran DPA-SKPD
- Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran SKPD
- Menetapkan SPD;
- Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah
- Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- Menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretaris

Tugas :Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;

Fungsi :

- Pengordinasian penyusunan rencana, program, dan kegiatan dilingkungan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah;
- Pengordinasian Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- Pembinaan rusan rumah tangga dan administrasi kepegawaian;
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan Negara;
- Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. Bidang Anggaran

Tugas : Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penganggaran daerah dengan mengkoordinasikan, mengendalikan penyusunan program dan kegiatan SKPD sesuai tugas dan tanggung jawabnya

Fungsi:

- Merumuskan kebijakan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- Merumuskan kebijakan pelaksanaan APBD dan APBD-P
- Menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan DPA SKPD dan DPPA SKPD; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Bidang Akuntansi

Tugas : Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang akuntansi, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, menyusun pedoman dari petunjuk teknis

pelaksanaan akuntansi pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Fungsi :

- Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan rencana dan program bidang akuntansi
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintahan pada SKPD;
- Pelaksanaan pembinaan dan bimtek akuntansi pemerintahan serta regulasi keuangan lainnya
- Penyusunan Laporan keuangan Pemerintahan Daerah
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Bidang Aset

Tugas : Membantu kepala Badan dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Aset yang menjadi tanggung jawab

Fungsi :

- Perumusan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- Pelaksanaan koordinasi penatausahaan, penggunaan, penilaian, pemanfaatan, pengamanan/pemeliharaan, pemindatanaganan. Penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah (BMD); dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Perbendaharaan

Tugas : Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang perbendaharaan, menyusun pedoman pelaksanaan APBD, pembinaan kebendaharaan, mengusulkan penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD serta melakukan penagihan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Fungsi :

- Pengumpulan, pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan bidang perbendaharaan dan verifikasi;
- Pengujian kebenaran daftar penguji atas penertiban surat perintah membayar dari SKPD
- Pemberian pertimbangan serta mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi;
- Pelaksanaan sistem penggajian, pelaporan data PNS yang efektif dan efisiensi;
- Pelaksanaan Koordinasi penerimaan daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yang dituangkan dalam Renja tahun 2019 adalah :

1. Pengelolaan Aset belum optimal
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan keuangan.
3. Belum optimalnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD.

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Adanya beberapa SKPD yang belum tertib penatausahaan Aset
2. Masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendidikan tentang pengelolaan keuangan.
3. Sering terjadinya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masih terbatasnya SDM dalam penguasaan perkembangan teknologi informasi.

1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Sejak tahun 2007 sampai 2015 BPKAD menggunakan Sistem Aplikasi yang berbasis offline dalam penyusunan anggaran dan penatausahaan

keuangan, tahun 2016 sistem penganggaran dan penatausahaan keuangan sudah berbasis semi online, namun belum terintegrasi antara BPKAD dan SKPD, namun sebagian SKPD sudah menggunakan ekspor impor data atau sistem upload download untuk pengiriman data. Beberapa permasalahan tersebut yaitu kurangnya efektifitas penyusunan APBD, kurang sinkronnya perencanaan dan penganggaran, penyelesaian aset, pengadaan barang dan Jasa, dan daya serap anggaran yang kecil, selain itu juga diperkuat dengan kurangnya akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Permasalahan tersebut pada dasarnya berkaitan antara lain dengan permasalahan Infrastruktur yang kurang memadai, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Sistem *Informasi Taro Ada Taro Gau* (SITATU) yaitu aplikasi yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan dan pelaporan aset SKPD yang dipergunakan sebagai alat bantu SKPD untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Aplikasi terintegrasi tersebut terus dikembangkan untuk mempermudah dan meperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kab. Bone, dan yang kedua yaitu Sistem Informasi Bendahara Umum Daerah (SIBUNDA), aplikasi yang berbasis digital untuk menampilkan informasi proses pelayanan Bendahara Umum Daerah. Aplikasi tersebut dikembangkan untuk mempermudah mengetahui jalannya proses pelayanan pada Bendahara Umum Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bone.

1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone selama tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan ungsi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance*

gap) bagi perbaikan kinerja jadi masadatang. Agar mempermudah memahami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone diperlukan suatu penyajian yang berurutan dan tersistem, untuk itu Tim Penyusun membuat sistematika penyajian yang sudah sesuai standar pelaporan sebagai berikut:

1. Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi aspek strategis serta struktur organisasi

2. Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2020

3. Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja sebagai hasil perbandingan Penetapan Kinerja Tahun 2019 dengan Pencapaian kinerja Tahun 2020 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan tentang keberhasilan kinerja selama tahun 2020

4. Bab IV : PENUTUP

Bab ini berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dan Saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Gambar2.1

Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2018-2023 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Bone.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Bone 2018-2023 adalah ***Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.***

Visi ini dijabarkan dalam Misi Bupati yaitu :

1. ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).***
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publi .
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Berkaitan dengan misi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, akan menjalankan program dan kegiatan sebagaimana misi **1** yaitu ***Meningkatkantata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).*** Implikasi misi pada BPKAD adalah penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif dan akuntablesebagai upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik sebagaimana dijabarkan dalam tujuan dan sasaran BPKAD.

2.1.2 Tujuan dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone.

Adapun rumusan tujuan didalam Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 berdasarkan kesesuaian dengan indikator kinerja antara lain sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

- Indikator:
- 1. Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD
 - 2. Nilai Pengukuran survey kepuasan masyarakat.
 - 3. Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Tujuan, Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra BPKAD

No	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR
1	Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Opini BPK-RI berdasarkan hasil audite terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	OPINI	WTP	WTP
2	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Predikat SAKIP BPKAD atau hasil evaluasi Inspektorat / Kemenpan RB	Predikat	A	AA
		Nilai Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	91	80

2.1.3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

- Sasaran : 1. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi sinformasi.
2. Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2.2. Sasaran, Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra BPKAD

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP
	Persentase Aset Tetap yang dapat dimanfaatkan	%	100%	99,35%
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Pengukuran survey kepuasan masyarakat	Nilai	91	80
	Predikat SAKIP BPKAD atas Hasil Evaluasi Inspektorat / Kemenpan RB	Predikat	A	AA

2.1.4 Program untuk pencapaian sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Program Penunjang Pemerintahan Umum
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2020 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra 2013-2020, Rencana Kerja (RENJA) 2020, IKU dan APBD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD	Opini	WTP
	Persentase Aset Tetap yang dapat dimanfaatkan	%	99,35%
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Pengukuran survey kepuasan masyarakat	Nilai	80
	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	BB

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	98%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Kondisi Baik	%	99%
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan Aset dengan baik	%	100%
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu	%	100%
5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D yang terbit Kurang 2 (Dua) Hari terhadap SP2D yang Terbit	%	99%
6	Peningkatan Penunjang Pemerintahan Umum	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	%	100%
7	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD dan APBD P sesuai ketentuan	Waktu	Tepat Waktu
		Persentase Belanja Langsung Terhadap total APBD	%	50%
		Persentase Belanja Tidak Langsung Terhadap total APBD	%	50%
		Persentase Belanja Modal Terhadap Total APBD	%	30%
		Persentase Belanja Kesehatan Terhadap Total APBD	%	15.68%
		Persentase Belanja Pendidikan Terhadap Total APBD	%	21.85%
		Persentase Silva Terhadap Total APBD	%	2.76%
		Persentase Penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrua	%	93.74%
		Persentase Penyaluran Belanja Daerah	%	97.24%
		Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	%	81.82%
		Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang Bersertifikat Hak Guna Bangunan	%	29.78%

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
8	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Tindak Lanjut Temuan Kerugian Negara Melalui Sidang TP-TGR	%	97%

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.6. IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD	Opini	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap lapran keuangan pemerintah daerah	Laporan tahunan
	Persentase Aset Tetap yang dapat dimanfaatkan	%	Aset Tetap yang dapat dimanfaatkan X 100%	Laporan triwulan dan tahunan
			Total Aset Tetap	
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Pengukuran survey kepuasan masyarakat	Nilai	Hasil survay kepuasan masyarakat	Laporan hasil survey tahunan
	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Itda

Tabel 2.7. IKU dan target setiap tahunnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET CAPAIATN SETIAP TAHUN			
				2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan, akuntabel berbasis teknologi informasi	Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET CAPAIATN SETIAP TAHUN			
				2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat SAKIP BPKAD atas hasil evaluasi Inspektorat/Kemenpan RB	Predikat	BB	A	A	A
		Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat	Nilai/Mutu	80 (Baik)	83 (Baik)	89 (Sangat Baik)	91 (Sangat Baik)

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone maka jumlah pendanaan yang dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.**69.384.221.530,66** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8. Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	34.989.221.530,66	50.43%
2	Belanja Langsung	34.395.000.000,00	49.57%
	JUMLAH	69.384.221.530,66	100%

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9. Alokasi perSasaran Tahun Anggaran 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PERSEN TASE ANGGARAN
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			76.77%
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22,756,961,450	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	517,444,800	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PERSEN TASE ANGGARAN
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	500,000,000	
			Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	737,000,000	
			Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1,893,563,700	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			4.61%
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	34,500,000	
			Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	376,800,000	
			Kegiatan Pengadaan Mebeleur	176,800,000	
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	478,650,600	
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas Operasional	315,000,000	
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan Gedung Kantor	205,522,000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0.34%
			Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	117,500,000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			0.87%
			Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	107,190,350	
			Kegiatan Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat PertanggungJawaban	104,553,000	
			Kegiatan Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	89,202,200	
		Program Penunjang Pemerintahan Umum			0.81%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	Persen Tase Anggaran
			Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	37,778,500	
			Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	14,310,000	
	Nilai Pengukuran survey kepuasan masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			0.15%
			Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Dana Kas Daerah Oleh BUD	278,337,500	
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			15.99%
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD/ Persentase Aset Tetap yang dapat dimanfaatkan		Kegiatan Penyusunan Analis Standar Belanja	160,094,050	
			Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	142,227,500	
			Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	464,069,550	
			Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	299,569,250	
			Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	173,099,550	
			Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	208,050,300	
			Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD	278,756,200	
			Kegiatan Tentang Penyusunan Rancangan KDH Tentang Penjabaran PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD	214,450,000	
			Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	235,165,000	
			Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keunagan Daerah	273,726,300	
			Kegiatan Peningkatan Manajemen ASET/Barang Daerah	235,581,500	
			Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD	328,205,800	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	Persen Tase Anggaran
			Kegiatan Pengamanan Aset Daerah	188,134,500	
			Kegiatan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota keuangan APBD	77,117,600	
			Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA	128,712,200	
			Kegiatan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	69,340,950	
			Kegiatan Penyusutan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	45,191,000	
			Kegiatan Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	122,560,750	
			Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	172,088,800	
			Kegiatan Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan daerah	155,920,000	
			Kegiatan Pengelolaan Administrasi Data Kearsipan keuangan	21,601,750	
			Kegiatan Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Membayar	280,072,550	
			Kegiatan Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	235,395,500	
			Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	349,233,600	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan penyusunan Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD	173,801,000	
			Pelaporan Aset	76,871,000	
			Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Bangunan	147,194,700	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PERSEN TASE ANGGARAN
			Pengelolaan Gaji	245,155,000	
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			0.44%
			Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan TGR	152,500,000	
				34,395,000,000	100%

Pada tabel diatas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar **Rp.34.395.000.000,-** dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan besaran **76.77%** dikarenakan adanya program administrasi perkantoran dengan indikator kegiatan pembiayaan belanja listrik pemerintah daerah yang menyerap anggaran sekitar **76.77%** untuk membiayai beban pemakaian listrik pemerintah kabupaten bone selama 1 tahun. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi yaitu sebesar **15.99%**, dari total anggaran belanja langsung.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilandan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Bone nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPKAD pada tahun 2020 dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

1.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019, tahun 2018, tahun 2017, tahun 2016, dan 2015;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yaitu tahun 2018-2023;
 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Tingkat efisiensi menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai capaian kinerja sasaran. Analisis efisiensi bertujuan untuk mengukur seberapa efisien penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sasaran. Semakin sedikit input (anggaran) yang dikeluarkan untuk mencapai output (kinerja) maka tingkat efisiensi semakin tinggi. Sementara semakin banyak input yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja sasaran maka tingkat efisiensi semakin rendah.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2020, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0;
2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

Capaian Indikator Kinerja =

Realisasi

Target

x 100%

3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indicator kinerja sasaran
4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:
 - >100 = Baik Sekali
 - 76s/d100 = Baik
 - 66s/d<75 = Cukup
 - 51s/d<65 = Kurang
 - <55 = Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Adapun realisasi capaian dari perjanjian kinerja tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD	WTP	WTP	100%
		Persentase Aset Tetap yang dapat dimanfaatkan	99,35%	90.33%	90,92%
2	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Pengukuran survey kepuasan masyarakat	80%	86,95%	108,68%
		Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	BB	100%

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran yang tertuang pada Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Bone. IKU BPKAD Kab. Bone digunakan sebagai ukuran keberhasilan BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 2 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja utama dan 19 indikator kinerja. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD	WTP
		Persentase Aset Tetap yang dapat dimanfaatkan	90,33
2	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Pengukuran survey kepuasan masyarakat	86,95
		Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat capaian Indikator Kinerja Utama “Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD” dapat terealisasi Wajar Tanpa Pengecualian atas Audite Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2020, sehingga ketercapaian target kinerja dari indikator sasaran strategis pertama yaitu 100%. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Aset Tetap yang dapat dimanfaatkan” dapat terealisasi 90,33% dibawah target 99.35%, sehingga ketercapaian target kinerja dari indikator sasaran strategis kedua yaitu 109,98%. Capaian Indikator “Nilai Pengukuran survey kepuasan Masyarakat” dapat terelisasi 86,95 diatas target nilai 80, sehingga ketercapaian target kinerja dari Indikator sasaran strategis ketiga adalah 96.63%. Capaian Indikator Kinerja Utama “Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP” mencapai target BB, sehingga

ketercapaian target kinerja dari Indikator sasaran strategis keempat adalah 100%

Dari dua sasaran dengan empat indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.2. Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2020

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		
1	Baik Sekali	1	96.63%
2	Baik	1	100%
3	Cukup		
4	Kurang		
5	Sangat Kurang		
	Jumlah	2	97.35%
Sasaran 2	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi		
1	Baik Sekali		
2	Baik	2	99,00%
3	Cukup		
4	Kurang		
5	Sangat Kurang		
	Jumlah	2	99,00%

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap dua sasaran dengan empat indikator kinerja, diketahui bahwa satu indikator sasaran 96,63% atau **Baik**, satu indikator sasaran 100% dan dua indikator sasaran 99% atau **Baik**.

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja

Pelaksanaan program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone tahun 2020 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama RPJMD dan instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

A. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Strategi:
 - 1. Mencapai target Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat.
 - 2. Mencapai target predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP
- Kebijakan:

Meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Sasaran Pertama

Pengukuran Target Kinerja dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Dokumen perencanaan (RPJMD) Kab Bone dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja.

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN (%)
1	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	99,35	96.63	96.87

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada Indikator Kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ihtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indeks Kualitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah dengan capaian 96.63 (*kurang dari target*) yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 96.63 dari target 99.35 dengan persentase 96.87 % Capaian ini dikategorikan (*Baik*). Predikat nilai capaian kinerja

dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

>100	Baik Sekali
76 s/d 100	Baik
66 s/d <75	Cukup
51 s/d <65	Kurang
<55	Sangat Kurang

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja kedua Sasaran Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Pengukuran survey kepuasan masyarakat	80%	86,95%	108,68%
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D yang Terbit Kurang 2 (Dua) Hari terhadap SP2D yang Terbit	99%	97,95%	98,94%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indicator kinerja utama yaitu Nilai Pengukuran survey kepuasan Masyarakat capaian **86,95%** telah **(Lebih dari target)** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai Nilai **86,95%** dari hasil nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat dari target **80%** dengan persentase **108,68%** Capaian ini dikategorikan **(Baik)**. Begitu pula capaian terhadap indikator Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut mencapai rata-rata 98,94% Sedikit Dibawah Target 99% atau dikategorikan **(Baik)** .

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.6. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
	2018	2019	2020
Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	95.26	97.19	96.63

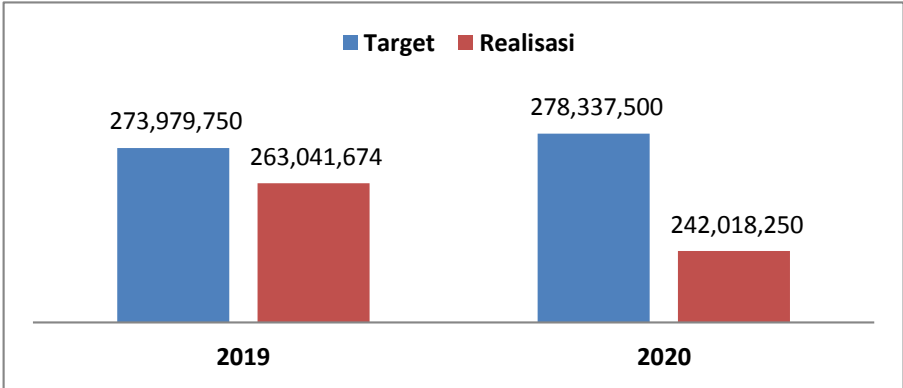
Capaian ini dikategorikan **Baik** berdasarkan predikat nilai capaian kinerja. dengan Nilai 96.63 masuk **Baik**. Nilai ini tidak mencapai target dan capaian tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya dimana nilai Tahun 2019 = 97.19 (Baik) dikarenakan adanya Pandemi covid 19 yang melanda Indonesia dan beberapa Negara lainnya, sehingga sangat perlu diperhatikan indikator indikator untuk memperbaiki Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP

Tabel 3.7. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	
	2019	2020
Nilai Pengukuran survey kepuasan masyarakat	77	80
	263.041.674	242.018.250

Realisasi yang mendukung sasaran indikator Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat dari tahun 2019 mencapai 77% dari target 263.041.674, mengalami Peningkatan Pada Tahun 2020 menjadi 80% dari target 242.018.250

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target akhir Renstra



d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kepuasan masyarakat tentunya tidak lepas dari pelayanan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Pencapaian kepuasan masyarakat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone mencakup keseluruhan aspek pelayanan. Adapun aspek yang dinilai dari kuesioner:

- 1) Kesesuaian persyaratan pelayanan Yaitu kesesuaian persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
- 2) Kemudahan prosedur pelayanan yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- 3) Ketepatan waktu pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Kejelasan / kesesuaian biaya pelayanan yaitu kejelasan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan serta kesesuaian atas biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat terhadap layanan yang di dapatkan.
- 5) Kepastian produk layanan Yaitu kepastian bahwa produk layanan yang dihasilkan adalah sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
- 6) Kompetensi petugas pelayanan yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Perilaku petugas layanan yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.

- 8) Kejelasan maklumat pelayanan Yaitu kejelasan dan kesesuaian antara maklumat pelayanan dengan kenyataan yang ada.
- 9) Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan Yaitu kejelasan dan responsifitas dalam memberikan tindak lanjut terhadap penanganan pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat pengguna layanan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Sasaran Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5=4/3
1	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	100%	27.513.175.925	1,0100
		BB	28.471.776.600	
	Rata-rata capaian Kinerja	100%	96,63%	
2	Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat	100%	242.018.250	1,0416
		97.24%	278.337.500	
	Rata-rata capaian Kinerja	100%	86.95%	

Tabel 3.9. Analisis tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Sasaran Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana capaian Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Hasil Analisis
	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	99,72%	96,25	1.03605	100%	100	0,01	102,65	Efisien
1	Program Administrasi Perkantoran	1.579	98,24	0,01607	1.579	100	0,01579	0,017732	Efisien
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	361	99,83	3,61614	361	100	3,61	0,017000	Efisien
	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	658	94,66	6.95119	684	100	6,84	0,016245	Efisien
	3 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	652	97,05	6,71818	624	100	6,24	0,076631	Efisien

No.		Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana capaian Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Hasil Analisis
	4	Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	1100	92,27	11,92153	1000	100	01	10,92153	Efisien
	5	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	8	82,74	0,09668	8	100	0,08	0,2085,	Efisien
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	88,98	1.123841	98	100	0,98	0.146776	Efisien
	6	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor	3	100,00	0.03	3	100	0.03	0	Efisien
	7	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	81	97,53	0,83051	81	100	0.81	0,030876	Efisien
	8	Kegiatan Pengadaan Mebeuler	36	99,94	0,36021	36	100	0.36	0.00058	Efisien
	9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	4	84,84	0,04714	4	100	0,04	0.1785	Efisien
	10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional	35	75,70	0,46235	35	100	0,35	0,321528	Efisien
	11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	40	92,04	0,43459	40	100	0,40	0,086475	Efisien
	12	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12	78,87	0,15214	12	100	0,12	0,267833	Efisien
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	13	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	12	78,87	0,15214	12	100	0,12	0,267833	Efisien
4		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7	90.07	0.07771	7	100	0,07	0.110142	Efisien
	14	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	93,96	0,07449	7	100	0,07	0.06414	Efisien
	15	Kegiatan Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat PertanggungJawaban	66	98,31	0.67134	66	100	0,66	0,017190	Efisien
	16	Kegiatan Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	24	75,73	0,31691	24	100	0,24	0,320458	Efisien
5		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	7500	86,95	86,25646	7500	100	7,500		Efisien
	17	Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Dana Kas Daerah Oleh BUD	7500	86,95	86,25646	7500	100	7,500	10,50086	Efisien
6		Program Penunjang Pemerintahan Umum	6	81,04	0,07403	6	100	0,06	0.23383	Efisien
	18	Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	6	85,26	0.07037	5	100	0.05	0,4074	Efisien
	19	Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	25	69,88	0.357775	25	100		0.4311	Efisien

Berdasarkan table diatas maka dalam rangka mencapai kinerja Sasaran Pertama yang didukung oleh 6 (enam) program dan 19kegiatan, dan seluruh Program dan Kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 99,72%, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 9 % dari

total anggaran yang dialokasikan, maka indeks efisiensi penggunaan sumber daya sasaran Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 1,0635 dan tingkat efisiensi 102,65 atau (*efisien*).

Banyaknya program yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dari sasaran ini adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Penunjang Pemerintahan Umum. Adapun capaian indikator pertama untuk sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi sebesar 96,25%.

Tabel 3.10. Keterkaitan Program terhadap Capaian Indikator Kinerja pertama Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA
<i>Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</i>	<i>Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP</i>	28,741,114,100	28,000,141,065	97.42
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	26,404,969,950	25,939,819,113	98.24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang kondisi Baik	1,587,272,600	1,412,364,902	88.98

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan Aset dengan baik	117,500,000	92,675,000	78.87
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu	300,945,550	271,052,100	90.07
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D yang Terbit Kurang 2 (Dua) Hari Terhadap SP2D yang terbit	278,337,500	242,018,250	86.95
Program Peningkatan Penunjang Pemerintahan Umum	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	52,088,500	42,211,700	81.04

Alokasi anggaran untuk mendukung 6 Program ini adalah sebesar Rp. 28,741,114,100,- realisasi sebesar Rp. 28,000,141,065,- atau 97.42%. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah Terlaksananya kegiatan yang mendukung sarana dan prasana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Program dari indikator kinerja kedua yang mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun capaian indikator kedua untuk sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerahyang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi sebesar 90.33%.

Tabel 3.11. Keterkaitan Program terhadap Capaian Indikator Kinerja kedua Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerahyang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Pengukuran survey kepuasan masyarakat	278,337,500	242,018,250	86.95
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D yang Terbit Kurang 2 (Dua) Hari terhadap SP2D yang Terbit	5,501,385,900	4,969,480,254	90.33

Alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 278.337.500,- realisasi sebesar Rp. 242.018.250,- atau 86.95% dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah Peningkatan Pelaksanaan Dana Kas Daerah Oleh BUD.

g. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu masih diperlukan inovasi yang dapat meningkatkan pelayanan publik. Adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan dibawah rata-rata nilai baik.
- 2) Mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah dinilai baik.
- 3) Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang secara konsisten terutama dengan memperhatikan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan,
- 4) Melakukan perbaikan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati terkait biaya pelayanan kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah kerja Kabupaten Bone, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian biaya pelayanan mendatang lebih baik.
- 5) Melaksanakan kegiatan penyusunan IKM secara periodik sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan IKM dari waktu ke waktu dan membandingkan IKM dengan OPD pelayanan publik yang lain, sehingga dapat dilakukan

perbaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik secara bermakna.

- 6) Meningkatkan kedisiplinan, etos kerja dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan service excellent (pelayanan prima) khususnya bagi petugas pelayanan/Frontline yang melayani masyarakat secara langsung serta menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan, disiplin kerja, jiwa melayani yang tulus dan mendapatkan dukungan keluarga.
- 7) Memberikan pelatihan keterampilan dan motivasi untuk meningkatkan kompetensi yang diperlukan sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas pelayanan.
- 8) Memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan, dengan mengoptimalkan media yang sudah ada untuk diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan website OPD pelayanan publik, Situs resmi Pemerintah Kabupaten Bogor, Facebook, Twitter , telepon , SMS center, Email, dan lain sebagainya
- 9) Memberikan penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) kepada petugas yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.
- 10) Mempedomani dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta membuat dan Menindaklanjuti Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji/komitmen untuk memberikan pelayanan yang

lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.

B. Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

- Strategi:
Perbaikan mekanisme pengendalian pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel.
- Kebijakan:
Peningkatan koordinasi dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel.

a. Perbandinganantara Target dan Realisasi Sasaran Kedua

Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA
<i>Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</i>	<i>Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>100%</i>
	<i>Persentase Aset Tetap yang dapat dimanfaatkan</i>	<i>99.17</i>	<i>97,19</i>	<i>98%</i>
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan Perubahan APBD sesuai Ketentuan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100.00%
	Persentase Belanja Langsung terhadap APBD	50%	50%	100%
	Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap total APBD	50%	50%	100%
	Persentase Belanja Modal terhadap APBD	30%	30%	100%
	Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD	15.68%	15.08%	95.66%
	Persentase Belanja Pendidikan terhadap total APBD	21.85%	21.75%	99.54%
	Persentase SILPA terhadap total APBD	2.76%	4.50%	163.04%
	Persentase Penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrual	93.74%%	88.33%	98.00%

	Persentase Penyaluran Belanja Daerah	97.24%	94.55%	97.23%
	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	81.82%	98%	98.00%
	Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang Bersertifikat Hak Guna Bangunan	29.78%	98%	98.00%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan Kerugian Negara yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR	97%	89.02%	91,77%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indicator kinerja utama yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan capaian **100%** telah **(mencapai target)** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun2020 mencapai Opini WTP (LKPD 2019) dari target Wajar Tanpa Pengecualian dengan persentase**100%** Capaian ini dikategorikan **(Baik)**. Begitu pula capaian terhadap indikator program penunjang sasaran tersebut mencapai rata-rata 99.24% atau dikategorikan **(Baik)**

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya Sasaran Kedua

Tabel 3.13. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah	WDP (LKPD 2013)	WDP (LKPD 2014)	WTP (LKPD 2015)	WTP (LKPD 2016)	WTP (LKPD 2017)	WTP (LKPD 2018)	WTP (LKPD 2019)

Realisasi pada tahun 2020 mencapai opini WTP dari target WTP, tidak mengalami perubahan dari tahun 2017 yang WTP dari target WTP realisasi tahun 2016 merupakan capaian yang sangat istimewa selama periode 2013-2020 yaitu mencapai opini WTP pertama sejak tahun 2013,2014, dan 2015 yang mencapai WDP dari target WDP.Opini Badan

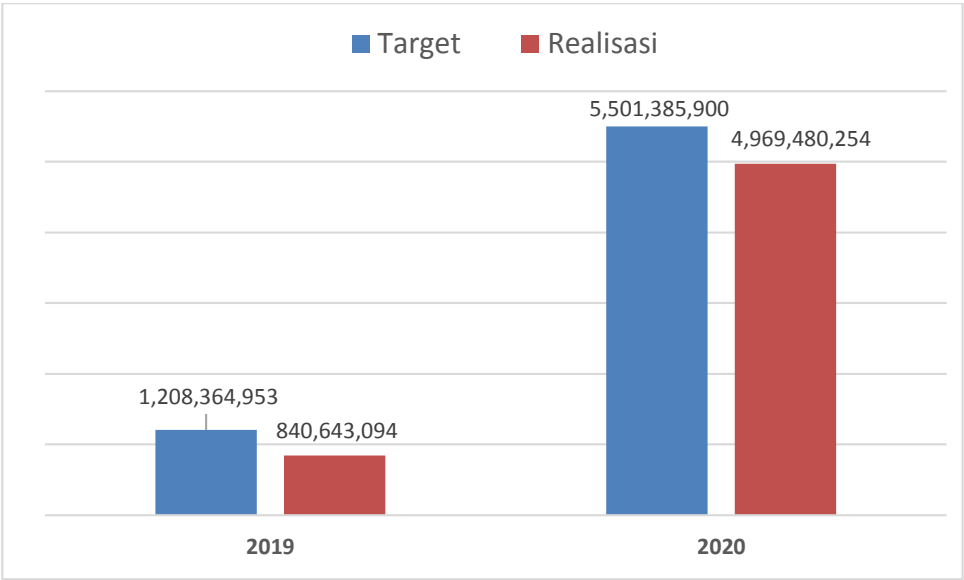
Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kelimakalinyasetelah 5 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020.

Tabel 3.14. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	
	2019	2020
Persentase Aset Tetap yang dapat dimanfaatkan	99,17% 840.643.094	99,35% 4,969,480,254

Realisasi indikator kinerja aset tetap yang dapat dimanfaatkan dari tahun 2019 mencapai persentase sebesar 99,17% Tidak Mengalami Perubahan Pada Tahun 2020 dengan realisasi sebesar 99,35% Pula.

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target akhir Renstra



d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan

aset daerah dengan Opini BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 100%. Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sejak tahun 2013 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun dan menyajikan:

- a. Laporan Keuangan; dan
- b. Laporan Kinerja

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggung jawaban pengelolaan perbendaharaan daerah menyampaikan kepada Bupati. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggung jawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan disusun dan

disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan terdiri atas:

- I. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD);
- II. Entitas Pelaporan (SK-PKD);

Melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi, sejak tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bone secara bertahap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrua menjadi SAP Berbasis Akrua.

Manfaat penggunaan basis akuntansi akrual bagi Pemerintah Daerah antara lain:

- 1) Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- 3) Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah daerah lebih baik;

- 4) Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Bone memasuki tahun ke 3 pada tahun 2020 ini, Walaupun salah satu indicator keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat dalam kewajaran penyajian laporan keuangan sebagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017, namun masih dijumpai potensi permasalahan, yang antara lain:

- 1) Belum seluruhnya PPK-SKPD memahami dengan baik konsep akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;
- 2) Permasalahan aset yang memerlukan penanganan secara lebih cermat antara lain:
 - a. Persoalan penyerahan asset kepada SKPD pengguna;
 - b. Penanganan asset perolehan hibah yang tidak melalui mekanisme APBD;
- 3) Perlunya penyesuaian kebijakan akuntansi dengan memasukkan hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi.

Laporan Keuangan dapat disusun untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mengetahui besarnya realisasi anggaran sampai periode tertentu, mengetahui posisi keuangan atas aset, kewajiban dan ekuitas entitas pelaporan pada suatu waktu cut off penyusunan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan Pemerintah Daerah juga sebagai alat evaluasi manajemen terhadap system akuntansi yang telah dilaksanakan, apakah telah menyajikan informasi keuangan secara akurat sesuai transaksi yang diinput dalam bentuk buku jurnal. Apabila terdapat perbedaan antara transaksi yang diinput dan

informasi keuangan yang dihasilkan, akan dapat segera dilakukan perbaikan dan koreksi sehingga laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Buku dapat disajikan secara wajar.

Langkah dan upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada SAP Berbasis Akrua tahun 2016 antara lain:

- 1) Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrua dari basis akuntansi kas menuju basis akuntansi akrua;
- 2) Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Berbasis Akrua;
- 3) Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- 4) Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone

Memperhatikan uraian tersebut di atas, capaian indikator kinerja Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian “tercapai” Namun demikian secara kualitas persentase Penyajian Laporan Keuangan SKPD yang mendukung Opini BPK RI dapat dipertanggungjawabkan, melalui pendampingan asistensi penyusunan Laporan Keuangan bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone. Sehingga dapat dianggap seluruh Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD) sebanyak 66 SKPD, yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan telah dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrua.

Opini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
- 2) Laporan Arus Kas(LAK),
- 3) Neraca
- 4) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 5) Laporan Operasional (LO);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas(LPE);dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK),

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yaitu standar yang mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari saji material Suatu pemeriksaan meliputi:

- 1) Bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 2) Penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Bone;
- 3) Penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang -undangan;
- 4) Penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan; serta
- 5) Penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan

kalau pun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Bahwa dalam rangka pencapaian sasaran kinerja SKPD dalam pelaksanaan tugasnya BPKAD Kabupaten Bone mempergunakan beberapa aplikasi penatausahaan keuangan dan aset daerah, antara lain:

- 1) SIAKUDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) Penganggaran untuk penyusunan RKA/DPA SKPD melalui sistem aplikasi berbasis website yang terintegrasi dari aplikasi E-Planning;
- 2) SIAKUDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) Penatausahaan untuk penyusunan dan Penatausahaan APBD yang Lengkap, terintegrasi dan mendukung penyajian Laporan Keuangan secara online keseluruhan SKPD serta monitoring penerbitan SP2D secara realtime;
- 3) SIMBMD (Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah), system yang digunakan untuk melakukan manajemen aset;
- 4) SIMGAJI (Sistem Informasi Manajemen Gaji) system yang digunakan untuk melakukan manajemen gaji PNS;
- 5) SIPBHP (Sistem Informasi Pengelolaan Barang Habis Pakai) sistem yang terintegrasi seluruh SKPD yang dimanfaatkan menyusun laporan realisasi Barang Habis Pakai;
- 6) SI KAREBA BUNDA (Sistem Informasi Bendahara Umum Daerah), sistem yang monitoring penerbitan SP2D secara realtime berbasis digital;
- 7) SITATU (Sistem Informasi Taro Ada Taro Gau), sistem yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran sampai pelaporan.

Hasil audite LKPD oleh BPK RI masih mendapatkan lima catatan dikarenakan masih lemahnya pengawasan

internal masing-masing perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Sehubungan dengan temuan tersebut BPK RI, merekomendasikan kepada Bupati Bone antara lain mengintruksikan kepada:

1. Kepala BPKAD lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja bawahannya dan selanjutnya berkoordinasi dengan Kepala BKPSDM dalam rangka validasi data kepegawaian untuk diakomodir dalam database SIMGaji;
2. Kepala BKPSDM lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja bawahannya;
3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi BKPSDM melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Kepala Sub Bidang Pengelola Gaji BPKAD mengenai database pegawai;
4. Sekretaris DPRD untuk memerintahkan kepada Bendahara DPRD untuk melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sesuai dengan ketentuan;
5. TAPD agar dapat melakukan verifikasi atas usulan belanja honorarium dalam RKA SKPD agar mengacu sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Kepala Dinas Perkintan, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang, Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kesbangpol untuk lebih cermat dalam mengusulkan belanja honorarium RKA SKPD, serta memerintahkan pegawai-pegawai yang bersangkutan untuk mengembalikan selisih honorarium yang tumpang tindih/ganda dan selisih honorarium yang tidak mengacu sesuai SBU ke Kas Daerah;
7. Kepala Desa terkait untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Rekomendasi tersebut adalah sebuah solusi yang sangat patut ditindaklanjuti bersama untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk menghindari ketidakpatuhan dan ketidakpatutan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan keberhasilan dari pencapaian indikator sasaran kedua ini disebabkan karena pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Persentase penyaluran belanja, Ketepatan Waktu Penetapan APBD,

Persentase penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrua, Penetapan Perda/Perkada tentang Pertanggungjawaban APBD TA. 2017, dan Persentase penyajian Laporan Barang Milik daerah secara benar sangat mendukung pencapaian sasaran.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bone. Oleh sebab itu BPKAD Kab. Bone harus mampu melakukan penatausahaan aset daerah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pertanggung jawaban atas Barang Milik Daerah kemudian menjadi semakin penting ketika Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan, yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi Barang Milik Daerah memberikan sumbangan yang signifikan didalam laporan keuangan (Neraca), yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, asset tetap, maupun asset lainnya. Peningkatan manajemen asset meliputi : penertiban, inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah mendorong percepatan penguatan APBD termasuk perencanaan penerimaan dan pendapatan daerah (PAD). Penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peningkatan kualitas Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendorong pencapaian pemberian opini/pendapat pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan PAD dari pemanfaatan aset daerah. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah yang meliputi:

- 1) Pengamanan fisik,
- 2) Pengamanan administratif dan
- 3) Pengamanan hukum.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya yang tersaji pada diatas, terjadi peningkatan nilai aset setiap tahunnya yang diakibatkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengamanahkan penganggaran belanja modal sebesar 30% terhadap total APBD, walaupun alokasi belanja modal terhadap total APBD belum mencapai 30% namun setiap tahunnya telah ditekankan untuk peningkatan terhadap pengalokasian belanja modal. Pada tahun 2019 seluruh perangkat daerah melakukan reklas dan penyusutan terhadap barang yang masa manfaatnya berkurang ataupun berakhir.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.15. Analisi atas Efisiensi terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	EFESIENSI (%)
1	2	3	4	5=4/3
1	Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD	100%	3.938.373.400	1,1089
		WTP	3.551.453.489	
	Rata-rata capaian Kinerja	100%	90,18%	
2	Persentase Aset Tetap yang dapat dimanfaatkan	99.35%		1,5032
		99,17%	840.643.094	
	Rata-rata capaian Kinerja	98,00%	65,19%	

Tabel 3.16. Tingkat Efesiensi terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.		Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana capaian Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/ SE)	Hasil Analisis
		Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	91,06%	84,01	0,01084	100%	100	0,01	0,08385906	Efisien
1		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	18,385	90.33	204	100	100	1	202.5314956	Efisien
	1	Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja	1	82.55	0.01211	1	100	0.01	0.21139	Efisien
	2	Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	2	94.61	0.02114	2	100	0.02	0.05697	Efisien
	3	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	2	97.35	0.02054	2	100	0.02	0.02722	Efisien
	4	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	2	93.19	0.02146	2	100	0.02	0.07308	Efisien
	5	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	2	99.73	0.02005	2	100	0.02	0.00271	Efisien
	6	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	93.83	0.01066	1	100	0.01	0.06576	Efisien
	7	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	1	97.75	0.01023	1	100	0.01	0.02302	Efisien
	8	Kegiatan Tentang Penyusunan Rancangan KDH Tentang Penjabaran PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD	1	95.9	0.01043	1	100	0.01	0.04275	Efisien
	9	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1	99.27	0.01007	1	100	0.01	0.00735	Efisien
	10	Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keunagan Daerah	1	69.14	0.07232	1	100	0.05	0.44634	Efisien
	11	Kegiatan Peningkatan Manajemen ASET/Barang Daerah	9	92.65	0.09714	9	100	0.09	0.07933	Efisien
	12	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD	3	99.83	0.03005	3	100	0.03	0.00170	Efisien
	13	Kegiatan Pengamanan Aset Daerah	66	83.66	0.78891	66	100	0.66	0.19531	Efisien
	14	Kegiatan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota keuangan APBD	66	99.64	0.02007	66	100	0.02	0.00361	Efisien
	15	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA	2	95.71	0.02090	2	100	0.02	0.04482	Efisien
	16	Kegiatan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	1	88.91	0.01125	1	100	0.01	0.12473	Efisien
	17	Kegiatan Penyusutan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	2	70.92	0.02820	2	100	0.02	0.41004	Efisien
	18	Kegiatan Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	820	100	8.20000	820	100	8.2	-	Efisien
	19	Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	66	57.01	1.15769	66	100	0.66	0.75408	Efisien

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana capaian Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/ SE)	Hasil Analisis
20	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan,Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan daerah	66	96.04	0.68721	66	100	0.66	0.04123	Efisien
21	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Data Kearsipan keuangan	12	73.62	0.16300	12	100	0.12	0.35833	Efisien
22	Kegiatan Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Membayar	7000	95.15	73.56805	7000	100	70	0.05097	Efisien
23	Kegiatan Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	12	88.87	0.13503	12	100	0.12	0.12524	Efisien
24	Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	66	93.26	0.70770	66	100	0.66	0.07227	Efisien
25	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	792	83.66	9.46689	792	100	7.92	0.19531	Efisien
26	Pelaporan Aset	2	87.17	0.02294	2	100	0.02	0.14718	Efisien
27	Penataan,Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Bangunan	15	49.07	0.30569	15	100	0.15	1.03791	Efisien
28	Pengelolaan Gaji	9372	95.35	98.29051	9372	100	93.72	0.04877	Efisien
2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	12	89.02	0.99472	12	100	0.8855	0.12334	Efisien
29	Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan TGR	12	89.02	0.13480	12	100	0.12	0.12334	Efisien

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dalam rangka mencapai kinerja Sasaran Kedua yang didukung oleh 2 (dua) program dan 29 kegiatan, seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 99%, maka indeks efisiensi penggunaan sumber daya sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah 0,01084 dan tingkat efesiensi 0,08385906 atau (*efisien*).

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dari sasaran ini adalah peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk menciptakan laporan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.12 di atas yaitu Opini BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah dengan

capaian Wajar Tanpa Pengecualian. Sebagai catatan atas target capaian kinerja ini yaitu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh harus disertai dengan pengurangan nilai temuan dan rekomendasi hasil audit BPK-RI dibandingkan hasil audit LKPD tahun sebelumnya.

Tabel 3.17. Keterkaitan Program terhadap Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD Persentase Aset Tetap yang dapat dimanfaatkan	5,653,885,900	5,105,232,048	90,30%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan Perubahan APBD sesuai Ketentuan	5.501.385.900	4.969.480.254	82,55%
	Persentase Belanja Langsung terhadap APBD			
	Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap total APBD			
	Persentase Belanja Modal terhadap APBD			
	Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD			
	Persentase Belanja Pendidikan terhadap total APBD			
	Persentase SILPA terhadap total APBD			
	Persentase Penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrua			
	Persentase Penyaluran Belanja Daerah			
	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar			
	Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang Bersertifikat Hak Guna Bangunan			
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	Persentase tindak lanjut temuan Kerugian Negara yang	152.500.000	135.751.794	89,02%

Pelaksanaan Kebijakan KDH	diselesaikan melalui sidang TP-TGR			
---------------------------	------------------------------------	--	--	--

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone untuk sasaran strategis Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah telah mencapai target indikator utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dimana opini BPK sebagai hasil audit yang dilakukan pada tahun 2019 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bone Tahun Anggaran 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp.5,653,885,900,- Realisasi sebesar Rp.5,105,232,048,- atau 90.30% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah terlaksananya penyusunan standar satuan harga sebanyak 2 dokumen, terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebanyak 1 Dokumen, terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD sebanyak 1 Dokumen, terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebanyak 1 Dokumen, terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebanyak 1 Dokumen, terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 1 Dokumen, terlaksananya penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebanyak 66 SKPD, terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah sebanyak 75 peserta, terlaksananya peningkatan manajemen aset/ barang daerah sebanyak 66 SKPD, penyusunan dan evaluasi dokumen pelaksanaan APBD sebanyak 66 SKPD, terlaksananya pengamanan aset

daerah, terlaksananya penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara dan nota nota keuangan APBD sebanyak 1 dokumen, terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan SIMDA sebanyak 66 SKPD, terlaksananya labelisasi aset sebanyak 2 jenis aset, terlaksananya penyusunan daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang/jasa sebanyak 2 dokumen, terlaksananya peningkatan administrasi pelaporan pajak daerah sebanyak 12 laporan, terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2020 sebanyak 1 dokumen, terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD tahun 2020 sebanyak 1 dokumen, terlaksananya studi banding pengelolaan keuangan daerah sebanyak 50 orang, terlaksananya penilaian barang milik daerah sebanyak 66 SKPD, terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang barang milik daerah sebanyak 1 dokumen, terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebanyak 66 SKPD, terlaksananya pengelolaan administrasi data kearsipan keuangan sebanyak 12 Kali, terlaksananya pengelolaan sistem dan verifikasi surat perintah membayar sebanyak 7000 SPM, terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal sebanyak 1 dokumen, terlaksananya peningkatan pelaporan administrasi keuangan daerah sebanyak 66 SKPD, terlaksananya peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah sebanyak 66 SKPD, terlaksananya pembinaan dan pengelolaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 66 SKPD, terlaksananya pelaporan aset sebanyak 12 laporan.

g. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Permasalahan terhadap sasaran kedua ini yaitu masih adanya beberapa temuan hasil audite BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bone dikarenakan kurang optimalnya pimpinan Perangkat Daerah ataupun

pejabat penatausahaan keuangan melakukan sistem pengawasan internal dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu masih adanya Perangkat Daerah yang tidak cermat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria:

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Namun demikian penerapan SAP berbasis akrual dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017, terdapat beberapa catatan yaitu:

- 1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Belum dikelola secara cermat;
- 2) Kelebihan pembayaran atas Tunjangan Komunikasi Insentif, dana Operasional dan Tunjangan Reses Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone;
- 3) Belanja Honorarium dan Jasa/Upah Kerja kepada empat SKPD tidak sesuai ketentuan;
- 4) Realisasi Belanja Modal tidak sesuai ketentuan

Alternatif solusi yang perlu dilakukan yaitu menindak lanjuti segala rekomendasi BPK RI atas bentuk catatan temuan tersebut.

Walaupun capaian pada sasaran Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan dilapangan antara lain:

1. Khusus untuk aset tanah masih ada yang belum dilengkapi dokumen kepemilikan yang akurat

(sertifikat) dan aset tanah yang yang telah dilengkapi dokumen kepemilikan memberi tambahan nilai atas aset tersebut.

2. Khusus untuk kendaraan dinas masih terdapat beberapa kendaraan yang tidak memiliki bukti kepemilikan (BPKB)
3. Penatausahaan aset SKPD belum sepenuhnya sesuai harapan,
4. Proses pengsertifikatan lahan yang membutuhkan waktu, dan
5. Beberapa aset yang ada pada SKPD dikuasai oleh orang yang tidak berhak, seperti orang yang sudah pensiun dan mutasi SKPD.

Aplikasi SIMBMD perlu di update atau penambahan fitur RKBMD guna menambahkan pemanfaatannya dalam mengintegrasikan RKBD pada sistem e-planning dan e-budgeting, dan perlu ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi dan negosiasi secara berkelanjutan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah.

3.2. REALISASI ANGGARAN

3.2.1 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 34,395,000,000,-

Anggaran Kinerja:

- Belanja Tidak Langsung	Rp.34,989,221,530.66,-
- Belanja Langsung	<u>Rp.34,395,000,000,-</u>
Jumlah	Rp.69,384,221,530.66,-

3.2.2 Pemanfaatan Anggaran

Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone terdiri dari:

- 1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. Rp. 34,989,221,530.66

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.334,395,000,000,- dengan jumlah 8 program dan 51 kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Langsung BPKAD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 dengan Tahun Sebelumnya

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN	REALISASI TAHUN 2019
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22,756,961,450	22,717,961,803	99.83	22,053,985,074
		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	517,444,800	489,820,499	94.66	314,560,784
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	500,000,000	485,240,000	97.05	309,940,000
		Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	737,000,000	680,039,411	92.27	734,208,841
		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1,893,563,700	1,566,757,400	82.74	1,835,840,250
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	34,500,000	34,500,000	100.00	25,750,000
		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	376,800,000	367,478,500	97.53	455,841,000
		Kegiatan Pengadaan Mebeleur	176,800,000	176,700,000	99.94	45,000,000
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	478,650,600	406,068,570	84.84	422,202,750
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas Operasional	315,000,000	238,452,832	75.70	571,345,847
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan Gedung Kantor	205,522,000	189,165,000	92.04	192,757,000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	117,500,000	92,675,000	78.87	12,000,000
4.	Program Peningkatan Pengembangan	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	107,190,350	100,720,600	93.96	89,343,850

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN	REALISASI TAHUN 2019
	Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		Kegiatan Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat PertanggungJawaban	104,553,000	102,782,400	98.31	96,384,000
		Kegiatan Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	89,202,200	67,549,100	75.73	38,110,900
5.	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Dana Kas Daerah Oleh BUD	278,337,500	242,018,250	86.95	263,041,674
6.	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	37,778,500	32,211,700	85.26	36,146,800
		Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	14,310,000	10,000,000	69.88	14,310,000
7.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Penyusunan Analis Standar Belanja	160,094,050	132,152,250	82.55	-
		Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	142,227,500	134,555,000	94.61	75,073,500
		Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	464,069,550	451,777,850	97.35	290,985,033
		Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	299,569,250	279,173,620	93.19	209,738,127
		Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	173,099,550	172,637,850	99.73	81,261,300
		Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	208,050,300	195,213,750	93.83	150,739,400
		Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD	278,756,200	272,488,600	97.75	210,649,809
		Kegiatan Tentang Penyusunan Rancangan KDH Tentang Penjabaran PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD	214,450,000	205,665,080	95.90	132,157,377
		Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	235,165,000	233,448,800	99.27	231,179,000
		Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keunagan Daerah	273,726,300	189,250,000	69.14	209,754,750

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN	REALISASI TAHUN 2019
		Kegiatan Peningkatan Manajemen ASET/Barang Daerah	235,581,500	218,272,441	92.65	226,586,344
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD	328,205,800	327,645,363	99.83	260,633,080
		Kegiatan Pengamanan Aset Daerah	188,134,500	157,396,050	83.66	176,117,600
		Kegiatan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota keuangan APBD	77,117,600	76,839,250	99.64	65,796,100
		Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA	128,712,200	123,193,000	95.71	80,084,000
		Kegiatan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	69,340,950	61,648,500	88.91	30,027,500
		Kegiatan Penyusutan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	45,191,000	32,047,500	70.92	30,147,000
		Kegiatan Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	122,560,750	122,560,750	100.00	122,560,750
		Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	172,088,800	98,100,900	57.01	32,006,500
		Kegiatan Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan daerah	155,920,000	149,739,000	96.04	201,617,100
		Kegiatan Pengelolaan Administrasi Data Kearsipan keuangan	21,601,750	15,903,000	73.62	19,252,400
		Kegiatan Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Membayar	280,072,550	266,480,000	95.15	287,195,900
		Kegiatan Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	235,395,500	209,202,050	88.87	240,923,800
		Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	349,233,600	325,687,300	93.26	378,240,400
		Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	173,801,000	145,397,100	83.66	148,643,400
		Pelaporan Aset	76,871,000	67,010,750	87.17	78,564,500
		Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Bangunan	147,194,700	72,229,300	49.07	66,625,650
		Pengelolaan Gaji	245,155,000	233,765,200	95.35	265,163,713
8.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan	Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan TGR	152,500,000	135,751,794	89.02	44,962,050

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN	REALISASI TAHUN 2019
	Kebijakan KDH					
			34,395,000,000	32.526.694.613		31,857,454,853

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp.34.395.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.32.526.694.613 atau 96.21%, sedikit mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2019, dengan Anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 31.857.454.853,-

Tabel 3.20 Target dan Realisasi APBD Tahun 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020

NO	URAIAN	TAHUN																				
		TARGET 2020	REALISASI 2020	%	TARGET 2019	REALISASI 2019	%	TARGET 2018	REALISASI 2018	%	TARGET 2017	REALISASI 2017	%	TARGET 2016	REALISASI 2016	%	TARGET 2015	REALISASI 2015	%	TARGET 2014	REALISASI 2014	%
4	PENDAPATAN	2,354,320,952,699.00	2,362,378,795,221.39	100.34	2,441.835.768.791	2,442.258.262.526	100,02	2,270.156.586.646	2,252.116.159.287	99,21	2,236.755.852.100	2,201.181.670.675	98,41	2,132.118.400.602	2,060.485.051.944	96,60	1,671.266.086.750	1,898.232.541.152	113,60	1,464.333.560.100	1,533.031.760.003	105
4.1	Pendapatan Asli Daerah	250,562,915,028.00	271,455,492,653.41	108.34	208.169.739.391	229.316.187.209	110,16	199.472.831.779	214.213.155.033	107,39	267.173.137.100	279.960.093.500	104,79	177.333.582.070	180.156.598.903	101,60	156.421.992.399	159.866.219.584	102,20	149.205.060.559	155.427.196.666	104
04.01.01	Pajak Daerah	49,618,601,766.00	54,735,355,216.00	110.31	50.763.580.491	54.759.118.027	107,87	41.636.794.167	51.236.484.457	123,06	36.983.033.600	44.726.076.045	120,94	35.083.033.385	37.605.711.247	107,20	32.178.841.100	34.613.923.937	107,60	29.406.819.100	36.277.176.531	123
04.01.02	Retribusi Daerah	21,514,984,000.00	22,181,941,946.00	103.10	22.214.333.000	18.799.503.124	84,63	22.455.566.712	19.652.213.419	87,52	12.671.944.000	12.795.043.203	100,97	14.343.221.684	11.336.148.488	79,00	14.005.987.000	14.505.987.000	103,60	15.376.587.000	15.378.571.068	100
04.01.03	Hsl. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10,683,630,905.00	10,647,161,905.00	99.66	8.558.628.147	8.558.628.147	100,00	7.092.406.600	7.055.937.640	99,49	6.364.434.900	6.727.965.905	105,71	2.886.469.000	4.179.816.872	144,80	2.336.469.000	2.936.469.000	125,70	2.036.469.000	2.331.537.248	115
04.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	168,745,698,357.00	183,891,033,586.41	108.98	126.633.197.753	147.198.937.912	116,24	128.288.064.300	136.268.519.517	106,22	211.153.724.600	215.711.008.347	102,16	103.323.525.793	127.034.922.297	122,90	94.763.709.350	104.365.612.462	110,10	53.296.361.400	101.439.911.819	190
4.02	Dana Perimbangan	1,466,350,603,499.00	1,440,565,778,179.00	98.24	1,634.922.733.000	1,603.392.651.884	98,07	1,568.604.640.867	1,548.309.677.324	98,71	1,555.594.547.000	1,512.633.984.416	97,24	1,565.186.413.780	52.114.930.328	3,30	1,260.075.685.600	1,242.614.366.711	98,60	1,084.716.798.300	1,083.624.984.390	100
04.02.01	Dana Bagi Hsl Pajak/Bagi Hsl Bukan Pajak	17,251,901,000.00	18,754,681,283.00	108.71	24.287.140.000	17.179.515.954	70,74	30.388.132.867	23.302.043.707	76,68	38.130.058.000	31.407.240.349	82,37	53.458.237.780	52.114.930.328	97,50	52.361.110.600	34.897.311.711	66,60	37.418.970.309	46.907.340.390	125
04.02.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,015,212,018,000.00	1,000,527,318,000.00	98.55	1,116.830.949.000	1,116.830.949.000	100,00	1,070.426.493.000	1,070.426.493.000	100,00	1,069.494.543.000	1,069.494.543.000	100,00	1,088.618.062.000	1,088.618.062.000	100,00	977.807.065.000	977.807.065.000	100,00	950.401.934.000	950.401.934.000	100
04.02.03	Dana Alokasi Khusus (DAK)	433,886,684,499.00	421,283,778,896.00	97.10	493.804.644.000	469.382.186.930	95,05	467.790.015.000	454.581.140.617	97,18	447.969.946.000	411.732.201.067	91,91	423.110.114.000	399.887.704.226	94,50	229.907.510.000	229.909.990.000	100,00	86.315.710.000	86.315.710.000	100
4.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	637,407,434,172.00	650,357,524,388.98	102.03	598.743.296.400	609.549.423.432	101,80	502.079.114.000	489.593.326.930	97,51	413.988.168.000	408.587.592.759	98,70	317.965.056.094	321.751.879.398	101,20	481.734.863.153	467.752.618.551	97,10	309.690.085.135	295.595.581.529	95
04.03.01	Hibah	100,809,486,000.00	111,197,545,150.00	110.30	101.397.018.400	106.730.801.724	105,26	91.765.615.000	85.040.830.500	92,67	-	-	-	11.038.190.000	11.038.188.960	100,00	-	-	-	-	-	-
04.03.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	Dana Bagi Hsl. Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	78,429,535,172.00	81,975,704,795.98	104.52	78.083.000.000	84.886.090.708	108,71	74.983.000.000	72.110.586.785	96,17	81.104.000.000	76.881.029.359	94,79	70.092.015.916	75.918.025.272	108,30	67.138.405.753	53.871.562.151	80,20	58.189.630.375	50.761.528.815	87
04.03.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41,710,557,000.00	41,710,557,000.00	100.00	9.486.726.000	9.486.726.000	100,00	307.386.499.000	306.620.285.200	99,75	306.940.168.000	306.700.190.600	99,92	202.773.125.000	202.773.125.000	100,00	388.189.433.000	385.474.033.000	99,30	217.767.982.000	217.767.982.000	100
04.03.05	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	82,670,000,000.00	81,685,861,443.00	98.81	72.444.000.000	71.113.253.000	98,16	27.944.000.000	25.821.624.445	92,40	25.944.000.000	25.006.372.800	96,39	34.061.725.178	32.022.540.166	94,00	26.407.024.400	28.407.023.400	107,60	33.732.472.760	27.066.070.714	80
04.03.06	Pendapatan Lainnya	333,787,856,000.00	333,787,856,000.00	100.00	337.332.552.000	337.332.552.000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Belanja	2,506,360,697,679.66	2,424,075,844,475.82	96.72	2,526.979.745.701	2,354.341.724.818	93,17	2,353.404.828.655	2,235.998.362.700	95,01	2,335.930.580.063	2,240.431.074.375	95,91	2,184.766.158.776	2,045.111.813.069	93,60	2,020.021.255.842	1,841.775.310.345	91,20	1,621.565.104.168	1,487.000.153.623	92
5.01	Belanja Tidak Langsung	2,157,170,285,298.66	2,099,734,855,242.44	97.34	1,503.938.696.548	1,407.463.872.056	93,59	1,449.797.031.740	1,359.314.685.231	93,76	1,354.075.542.816	1,322.409.001.832	97,66	1,364.718.123.160	1,296.194.903.754	95,00	1,268.991.948.432	1,192.434.833.096	94,00	590.242.005.350	542.306.609.820	92
05.01.01	Belanja Pegawai	943,798,309,598.66	908,910,490,900.50	96.30	1,008.207.540.158	924.357.628.406	91,68	927.270.742.459	849.608.038.076	91,62	878.446.141.656	862.728.295.367	98,21	980.945.461.358	922.893.000.080	94,10	1,011.608.534.016	894.670.854.461	88,40	450.242.949.622	431.717.602.972	96
05.01.02	Belanja Bunga	605,850,058,019.93	605,568,662,164.87	99.95	-	-	-	3,310.970.000	253.351.574	7,65	1,543.751.000	590.230.716	38,23	3,310.970.000	929.417.250	28,10	3,312.170.644	1,265.189.968	38,20	3,310.969.644	1,601.042.182	48
05.01.03	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,297.509.288	7,297.509.288	-	28.630.890.582	28.630.890.582	100,00	31.946.719.625	31.909.347.649	100
05.01.04	Belanja Hibah	130,175,078,425.07	117,305,328,425.07	90.11	35.208.900.000	24.390.100.000	69,27	104.514.007.050	97.608.807.050	93,39	43.856.381.000	33.521.141.213	76,43	16.694.200.000	11.262.890.000	67,50	7.257.500.000	2.157.500.000	29,70	12.435.000.000	6.482.500.000	52

NO	URAIAN	TAHUN																				
		TARGET 2020	REALISASI 2020	%	TARGET 2019	REALISASI 2019	%	TARGET 2018	REALISASI 2018	%	TARGET 2017	REALISASI 2017	%	TARGET 2016	REALISASI 2016	%	TARGET 2015	REALISASI 2015	%	TARGET 2014	REALISASI 2014	%
05.01.05	Belanja Bantuan Sosial	1,420,000,000.00	555,000,000.00	39.08	1,420.000.000	550.000.000	38,73	6.850.000.000	5.980.000.000	87,30	50.981.862.000	49.761.862.000	97,61	35.463.958.014	35.108.958.014	99,00	1.280.000.000	50.960.276.170	3.981,00	3.850.000.000	3.349.500.000	87
05.01.06	Belanja Bagi Hel. Kpd Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	-	-	-	6.393.184.370	6.313.169.520	98,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.754.472.000	1.754.472.000	-
05.01.07	Belanja Bantuan Keu. Kpd Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	447,886,839,255.00	447,886,838,655.00	100.00	451.209.072.020	450.640.828.300	99,87	406.351.312.231	405.854.264.531	99,88	376.747.407.160	375.794.960.536	99,75	320.006.024.500	317.968.973.096	99,40	216.402.853.190	214.508.371.916	99,10	86.201.894.459	65.492.145.018	76
05.01.08	Belanja Tidak Terduga	28,040,000,000.00	19,508,535,097.00	69.57	1.500.000.000	1.212.145.830	80,81	1.500.000.000	10.224.000	0,68	2.500.000.000	12.512.000	0,50	1.000.000.000	734.156.026	73,40	500.000.000	241.750.000	48,40	500.000.000	-	-
5.02	Belanja Langsung	349,190,412,381.00	324,340,989,233.38	92.88	1.023.041.049.153	946.877.852.762	92,56	903.607.796.915	876.684.000.000	97,02	981.855.037.247	918.022.072.543	93,50	820.048.035.616	748.916.909.315	91,30	751.029.307.410	649.340.477.249	86,50	1.031.323.098.818	944.693.543.804	92
05.02.01	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.611.846.900	-	-	-	-	-	-	-	-	450.242.949.622	431.717.602.972	-
05.02.02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	651.126.542.854	616.329.758.045	94,66	611.425.016.275	611.425.016.275	100,00	535.869.638.425	525.318.599.098	98,03	452.145.746.250	418.172.616.191	92,50	414.454.559.313	345.142.601.459	83,30	334.932.772.442	303.396.569.836	91
05.02.03	Belanja Modal	349,190,412,381.00	324,340,989,233.38	92.88	371.914.506.299	330.548.094.717	88,88	265.258.661.194	265.258.661.194	100,00	407.373.551.922	392.703.473.445	96,40	367.902.289.366	330.744.293.124	89,90	336.574.748.097	304.197.875.790	90,40	246.147.376.754	209.579.370.996	85
Surplus / Defisit		(152,784,694,297.66)	(64,177,248,410.43)	42.01	(85.143.976.910)	87.916.537.708	(103,26)	(83.248.242.009)	16.117.796.587	(19,36)	(99.174.727.963)	(39.249.403.700)	39,58	(124.281.106.832)	(2.582.638.214)	2,10	(121.788.714.690)	28.457.894.500	(23,40)	(88.533.344.165)	47.647.608.962	-54
6 Pembiayaan Daerah																						
6.01	Penerimaan Pembiayaan	163,494,764,194.66	163,494,763,794.66	100.00	95.143.976.910	95.143.976.910	100,00	89.295.314.009	89.295.314.009	100,00	122.221.799.963	121.784.005.969	99,64	161.537.222.442	159.956.768.596	99,00	127.542.472.285	136.675.269.332	107,20	94.159.190.064	94.495.190.064	100
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	163,494,764,194.66	163,494,763,794.66	100.00	95.143.976.910	95.143.976.910	100,00	59.295.314.009	59.295.314.009	100,00	120.721.799.963	121.202.865.127	100,40	159.537.222.442	159.387.176.123	99,90	127.442.472.285	136.675.269.332	107,20	94.159.190.064	94.159.190.064	100
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	30.000.000.000	30.000.000.000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000.000	581.140.842	38,74	2.000.000.000	569.592.473	28,50	100.000.000	-	-	-	336.000.000	-
06.01.07	Penerimaan Pembayaran ASKES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.08	Penerimaan Pembayaran Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	6.047.072.000	5.889.255.300	97,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.09	Penerimaan Piutang Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.02	Pengeluaran Pembiayaan	10,710,069,897.00	10,000,000,000.00	93.37	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00	6.047.072.000	5.889.255.300	97,39	23.047.072.000	23.245.864.760	100,86	37.256.115.610	36.652.330.420	98,40	5.753.757.595	5.595.941.390	97,30	5.625.845.899	5.467.529.694	97
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00	59.295.314.009	59.295.314.009	100,00	15.000.000.000	15	-	15.000.000.000	15.000.000.000	100,00	-	-	-	-	-	-
06.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	100.00	-	-	-	30.000.000.000	30.000.000.000	100,00	5.000.000.000	5.000.000.000	100,00	16.038.190.000	16.038.188.960	100,00	2.500.000.000	2.500.000.000	100,00	1.000.000.000	1.000.000.000	100

NO	URAIAN	TAHUN																				
		TARGET 2020	REALISASI 2020	%	TARGET 2019	REALISASI 2019	%	TARGET 2018	REALISASI 2018	%	TARGET 2017	REALISASI 2017	%	TARGET 2016	REALISASI 2016	%	TARGET 2015	REALISASI 2015	%	TARGET 2014	REALISASI 2014	%
06.02.03	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.047.072.000	2.889.255.300	-	3.047.071.505	2.889.255.300	94,80	3.047.071.505	3.395.755.300	111
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.047.072.000	2.889.255.300	94,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.05	Pembayaran Utang Belanja	710,069,897.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.170.853.610	2.724.886.160	-	206.686.090	206.686.090	100,00	1.578.774.394	1.071.774.394	68
06.02.06	Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.07	Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.08	Piutang Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	6.047.072.000	5.889.255.300	97,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Netto		152,784,694,297.66	153,494,763,794.66	100,46	85,143,976.910	85,143,976.910	100,00	83,248,242.009	83,406,058.709	100,19	99,174,727.963	98,538,141.209	99,36	124,281,106.832	123,304,438.176	99,20	121,788,714.690	131,079,327.942	107,60	88,533,344.165	89,027,660.370	101
6.03	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan (SILPA)	-	89,317,515,384.23	-	-	173,060,514.618	100,00	-	99,523,855.296	-	-	59,288,737.509	-	-	120,721,799.963	-	-	159,537,222.442	-	-	136,675,269.332	-

3.2.3 Penghargaan Yang Diterima

Penghargaan yang diterima pada tahun 2020 antara lain:

1. Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Bone oleh PT.TASPEN atas Penyetoran selisih iuran JKK JKM Priode Juli - Desember Tahun 2017.
2. Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Bone oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sebagai Tanda Terima Kasih atas Penyetoran iuran Wajib PNS Daerah dan Iuran Wajib Pemda Triwulan Ke IV Tahun 2020.
3. Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Bone oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sebagai Tanda Terima Kasih atas Penyetoran iuran Wajib PNS Daerah, Iuran Wajib Pemda dan PBI APBD.

3.2.4 Permasalahan dan Solusi

Walaupun pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 tercapai, berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga untuk menunjang kinerja pelayanan BPKAD yang berdaya guna dan berhasil guna, secara spesifik identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dibagi berdasarkan fungsi – fungsi yang dilaksanakan. Adapun fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Perencanaan Keuangan Daerah

Perencanaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan keuangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemudian dikoordinasikan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang anggotanya termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hasil koordinasi perencanaan keuangan pada TAPD selanjutnya dibahas bersama dengan Tim Badan Anggaran

DPRD. Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Perencanaan Keuangan Daerah adalah:

- a. Proses pembahasan RAPBD Kabupaten Bone pada DPRD masih didominasi pendekatan politis, sehingga pembahasan rancangan APBD seringkali berlangsung alot, yang mengakibatkan penetapan APBD juga berlangsung lama;
- b. Kemampuan keuangan daerah yang tidak seimbang dengan perencanaan belanja pada program dan kegiatan di masing-masing OPD, sehingga mengakibatkan banyak program dan kegiatan yang kurang mendapat dukungan dari segi pendanaan;
- c. Adanya OPD yang belum mengikuti perkembangan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan RKA, sehingga masih sering diperoleh rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi BPKD Provinsi atas RAPBD Kabupaten;
- d. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut;
- e. Proporsi pengalokasian belanja pembangunan lebih rendah dibandingkan belanja aparatur;
- f. Belum terealisasinya pengalokasian belanja modal minimum 30% terhadap APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Perencanaan Keuangan Daerah dapat disimpulkan bahwa *belum optimalnya fungsi perencanaan dan distribusi dalam penyusunan APBD.*

2. Perbendaharaan Keuangan Daerah

Pengelolaan administrasi perbendaharaan yang tertib dan cepat adalah salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Tertib dapat diartikan bahwa proses administrasi perbendaharaan dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penerbitan SPM, SP2D harus memenuhi syarat kelengkapan, sehingga proses penerbitan SP2D dapat berjalan dengan lancar

Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Perbendaharaan Keuangan Daerah, adalah:

- a. Pengelolaan Belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang masih memiliki kekurangan, dalam proses, perencanaan, penyaluran hingga pelaporannya;
- b. Pengelolaan gaji yang tidak cermat dalam proses pencairan, sering terjadi kelebihan bayar (puna bakti yang menerima gaji karena tidak dilaporkan ke BPKAD), aplikasi PT.Taspen yang digunakan belum mengaktifkan Betas Usia Pensiun secara otomatis untuk mendeteksi PNS yang memasuki masa purna bakti.
- c. Belum sepenuhnya penerapan Transaksi Non Tunai (TNT), yang berhadapan dengan upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Perbendaharaan Keuangan Daerah dapat disimpulkan bahwa *belum optimalnya pengelolaan belanja daerah*

3. Pelaporan Keuangandan Aset Daerah

Raihan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Bone selama 5 kali sejak tahun 2016-2020 merupakan kebanggaan sekaligus pencapaian yang maksimal atas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pelaporan pertanggung jawaban keuangan daerah. Untuk itu, ke depannya, prestasi ini harus terus menerus dipertahankan dengan cara meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya dalam transparansi pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan APBD, sehingga public dapat mengakses informasi yang handal terkait capaian dari pengelolaan APBD Kabupaten Bone.

Selain itu, Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah adalah;

- a. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat. Kurang bisa diimbangi dengan kecepatan adaptasi pada tahap implementasi bahkan timbul kendala yang disebabkan adanya potensi tumpang tindih / tidak sinkron antara satu peraturan dengan yang lain, dan adanya multitafsir terhadap satu peraturan perundang-undangan. Misalnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah yang menegaskan bahwa laporan keuangan yang disusun menggunakan SAP berbasis akrual. Penerapan laporan keuangan berbasis akrual belum diimbangi dengan sumber daya aparatur yang memadai.

- b. Pembinaan kepada OPD dalam hal pelaporan keuangan dan aset harus terus ditingkatkan, khususnya dalam penerapan *acrua*l *basic* agar tidak terjadi kesalahan dalam pertanggung jawaban, sehingga menyajikan laporan keuangan dan aset masing-masing OPD yang akuntabel dan tepat waktu dalam penyajiannya;
- c. Percepatan tindak lanjut Atas Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP serta Penyelesaian Temuan Kerugian Daerah yang perlu ditingkatkan;
- d. Ketersediaan Dokumen SPJ SKPD yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas, dan penatausahaan keuangan pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang belum tertib sepenuhnya.
- e. Penatausahaan aset yang belum tertib sepenuhnya, sekitar 70% aset pemda belum tersertifikat dan ada beberapa yang belum teridentifikasi serta beberapa aset dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, dan Tagihan penjualan angsuran atas ruko, toko, kios dan lods Pasar Sentral Palakka Watampone belum didukung dengan bukti perikatan, dan pembelian yang telah lunas belum diproses bukti kepemilikannya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pelaporan Keuangandan Aset Daerah dapat disimpulkan yaitu:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.
- 2) Belum optimalnya penatausahaan barang milik daerah.

4. Layanan Administrasi Perkantoran

Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka suatu organisasi membutuhkan layanan administrasi perkantoran yang dikelola dengan baik dan cepat. Berbagai layanan administrasi perencanaan, keuangan, hingga administrasi kepegawaian dan umum harus diupayakan terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi standar

pelayanan pemerintahan yang baik, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi PNS dan juga stake holder lainnya. Olehnya itu dibutuhkan Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing layanan administrasi yang diberikan kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang mampu menghadirkan kecepatan layanan administrasi.

Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka Layanan Administrasi Perkantoran, adalah:

- a. Standar Operasional Prosedur untuk masing - masing layanan administrasi yang diberikan kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang mampu menghadirkan kecepatan layanan administrasi;
- b. Kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya adalah salah satu cara bagi aparatur untuk terus memperbaharui sekaligus meningkatkan wawasan/kemampuan, baik dalam hal pengelolaan keuangan, maupun administrasi umum dan pemerintahan lainnya. Untuk itu, ke depan diharapkan PNS lingkup BPKAD dapat secara rutin ditugaskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya aparatur, baik PNS pria maupun perempuan, golongan II, III hingga golongan IV dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu, hingga muaranya adalah pemerataan kualitas SDM lingkup BPKAD yang memahami dan mampu menjalankan tupoksi yang melekat pada BPKAD secara professional;
- c. Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja BPKAD Kabupaten Bone yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah dapat disimpulkan bahwa *belum optimalnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusi Aparatur lingkup BPKAD*

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Peningkatan manajemen Aset Daerah;

2. Penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis *accrual*;
3. Peningkatan pemanfaatan sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan sistem pengelolaan barang milik daerah (E-Planning, E-Budgeting, dan SimBMD);
4. Penerapan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) dalam pengelolaan Kas Daerah yang berhadapan dengan percepatan realisasi APBD dan tertib administrasi; dan
5. Peningkatan dan modernisasi pelayanan berbasis mutu, melalui Inovasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone juga menjadimakna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA BPKAD. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2020 adalah **Baik**, karena seluruh indikator memenuhi kriteria **Baik** dan dua indikator memenuhi **Baik**.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga sebagai bagian dari kebijakan strategis daerah, khususnya dalam RENSTRA dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya, juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk pelayanan yang memperoleh beberapa penghargaan oleh Pemerintah.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone ke depan. Dalam meningkatkan layanan pengelolaan keuangan, penatausahaan dan pengamanan aset daerah, dan peningkatan SDM

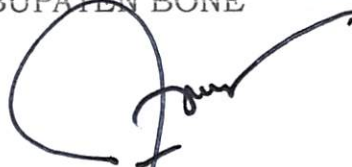
SDM Aparatur. Bagi instansi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, serta pelayanan ditahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 merupakan laporan tahunan dan sekaligus menjadi laporan masa akhir Rencana Strategis BPKAD Kab. Bone priode tahun 2013-2020. Berdasarkan masalah dan isu strategis untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance serta meningkatkan kinerja BPKAD Kab. Bone dimasa akan datang, perlu dirumuskan bersama indikator sasaran yang menjadi tolak ukur kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD Kab. Bone priode tahun 2018-2023.

Watampone, 2 Januari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BONE



H. NAJAMUDDIN, S.Sos., MM f
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip :19631007 198611 1 002

CAPAIAN KINERJA OUTPUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Program		Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja Output Tahun 2020				% Capaian Kinerja Output Tahun 2019	Perbandingan Kinerja	Keandalan Data	
					Satuan	Target	Realisasi	Capaian			Formulasi	Sumber Data
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	98%	94.43%	96.36%	50%	188.86%		SIPPD dan EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
1.1		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang di bayar	Rekening	361	360	99.72%	361	99.72%			EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
1.2		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang menerima tunjangan	Kali	58	54	93.10%	109	49.54%			EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
1.3		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media yang Menyediakan Bahan Bacaan	Kali	52	50	96.15%	52	96.15%			EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
1.4		Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah SPPD	SPPD	1,100	1,020	92.73%	1,000	102.00%			EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
1.5		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Paket	8	7	87.50%	8	87.50%			EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase Sarana dan Perasarana Aparatur yang kondisi baik	%	99%	89.93%	90.84%	98%	91.77%		SIPPD dan EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
2.1		Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor	Paket	3	3	100%	5	60.00%			EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
2.2		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	31	30	96.77%	38	78.95%			EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
2.3		Kegiatan Pengadaan Mebeleur	jumlah kebutuhan mebeleur	Unit	36	35	97.22%	7	500.00%			EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
2.4		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Paket	4	3	75%	5	60.00%			EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
2.5		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	jumlah Mobil dan Motor yang dipelihara	Unit	35	26	74.29%	40	65.00%			EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
2.6		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Unit	40	37	92.50%	40	92.50%			EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100%	75%	75%	100%	75.00%		SIPPD dan EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
3.1		Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	ASN	12	9	75.00%	12	75.00%			EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			Persentase kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu	%	100%	82.47%	82.47%	100%	82.47%		SIPPD dan EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
4.1		Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	7	5	71.43%	5	100.00%			EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
4.2		Kegiatan Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban	Jumlah SKPD yang Verifikasi	SKPD	66	66	100.00%	3	2200.00%			EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
4.3		Kegiatan Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan SISMONTPEPA dan Laporan SPIP	Laporan	24	9	37.50%	12	75.00%			EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja Output Tahun 2020				% Capaian Kinerja Output Tahun 2019	Perbandingan Kinerja	Keandalan Data	
				Satuan	Target	Realisasi	Capaian			Formulasi	Sumber Data
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase SP2D yang Terbit Kurang 2 (dua) Hari terhadap SP2D yang Terbit	%	99%	86.67%	87.55%	98%	88.44%		SIPPD dan EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
5.1		Kegiatan Peningkatan pelaksanaan pengelolaan Dana Kas Daerah oleh BUD	Jumlah SP2D yang Diterbitkan	SP2D	7,500	6,500	86.67%	7450	87.25%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
6	Program Penunjang Pemerintahan Umum		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	%	100%	67.74%	68%	100%	67.74%		SIPPD dan EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
6.1		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	4	66.67%	6	66.67%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
6.2		Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Informasi yang Diupload	Berita	25	17	68.00%	20	85.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		15.68%	96.25%	613.84%		Belum diisi		SIPPD dan EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.1		Penyusunan analisis standar Belanja	Jumlah Dokumen Standar Belanja	Dokumen	1	1	100.00%		Belum diisi		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.2		Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Satuan Barang	Dokumen	2	2	100.00%	2	100.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.3		Penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Dokumen Ranperda APBD	Dokumen	2	2	100.00%	2	100.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.4		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD	Dokumen	2	2	100.00%	2	100.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.5		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD Perubahan	Dokumen	2	2	100.00%	1	200.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.6		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen per KDH tentang Penjabaran Perubahan	Dokumen	1	1	100.00%	1	100.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.7		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah Dokumen Perda APBD Pertanggungjijawaban	Dokumen	1	1	100.00%	1	100.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.8		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD Penjabaran Pertanggungjawaban	Dokumen	1	1	100.00%	1	100.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.9		Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Tersedianya sistem informasi keuangan daerah	Software	1	1	100.00%	1	100.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.10		Sosialisasi Peket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi	Kegiatan	1	6	600.00%	8	75.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.11		Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Aset Daerah	Laporan	9	3	33.33%	3	100.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.12		Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksnaan APBD	Jumlah DPA dan DPPA SKPD	DPA-DPPA	3	132	4400.00%	132	100.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.13		Pengamanan Aset Daerah	Daftar aset yang dimiliki	SKPD	66	55	83.33%	66	83.33%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.14		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	jumlah Dokumen PPAS dan NOTA Keuangan APBD	Dokumen	66	2	3.03%	2	100.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.15		Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA	Terlaksananya Monev aplikasi SIMDA	Software	2	1	50.00%	1	100.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja Output Tahun 2020				% Capaian Kinerja Output Tahun 2019	Perbandingan Kinerja	Keandalan Data	
				Satuan	Target	Realisasi	Capaian			Formulasi	Sumber Data
7.16		Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset	Kegiatan	1	2	200.00%	2	100.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.17		Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/jasa	Tersedianya Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang /jasa	Dokumen	2	2	100.00%	2	100.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.18		Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	jumlah Faktur Pajak	Faktur	820	820	100.00%	820	100.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.19		Penilaian Barang Milik Daerah	jumlah SKPD yang dinilai	Laporan	66	50	75.76%	66	75.76%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.20		Peningkatan Pengelolaan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dibina dalam penggunaan aplikasi penganggaran	SKPD	66	66	100.00%	66	100.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.21		Pengelolaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan	Jumlah pelaksanaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan	Kali	12	6	50.00%	12	50.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.22		Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Membayar	Jumlah SPM yang terbit	SPM	7,000	6,500	92.86%	7000	92.86%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.23		Peningkatan Pelaporan Administrasi keuangan Daerah	Jumlah Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	Laporan	12	10	83.33%	12	83.33%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.24		Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	SKPD	66	66	100.00%	66	100.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.25		Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD	Laporan	792	652	82.32%	792	82.32%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.26		Pelaporan Aset	Jumlah laporan aset Daerah	Laporan	2	2	100.00%	2	100.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.27		Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Bangunan	Jumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan	HGB	15	8	53.33%	15	53.33%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
7.28		Pengelolaan Gaji	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan	PNS	9,372	9,300	99.23%	9372	99.23%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
8	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase tidak lanjut temuan atas kerugian negara yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR	%	97%	83.33%	85.91%	96%	86.80%		SIPPD dan EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020
8.1		Peningkatan Pelaksanaan TGR	Jumlah Kasus TGR	Kasus	12	10	83.33%	10	100.00%		EVALUASI RENJA TRIWULAN IV THN.2020